LKjIP

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN JABON

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 17 Januari 2025

TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS

Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP, M.HP.
Pembina Tingkat I
NIP 19780416 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 17 Januari 2024

CAMAT SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT.
NIP. 197012081992011002

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT
Pembina Tk I / IV b
NIP.197012081992011002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK v
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
BAB I PENDAHULUAN
1. Kedudukan 1
2. Aspek Strategi Organisasi 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Srategis Tahun 2021-2026 ……..... 6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 …… 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja ……. 8
B. Analisis Capaian Kinerja ……. 9
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ……. 15
D. Realisasi Kinerja dan Anggaran …….. 22
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ……. 26
B. Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut …… 26
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ……..... 2
Tabel 1.2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah …… 3
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 …… 6
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 …….. 7
Tabel 2. 3 Rincian anggaran pada tahun 2024 ……. 7
Tabel 3.1 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja ……. 8
Tabel 3.2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja ……. 9
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ……... 9
Tabel 3.4 Capaian Prosentase Permasalahan trantibumyang difasilitasi Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026 …… 10
Tabel 3. 5 Tren Realisasi indikator kinerja "prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan" Tahun 2021 – 2023……... 11
Tabel 3. 6 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026 …….. 12
Tabel 3. 7 Tren Realisasi indikator kinerja "Nilai SAKIP" Tahun 2021 – 2023…… 12
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP dengan Realisasi Nasional …… 13
Tabel 3. 9 Capaian Nilai IPP Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026 …….. 14
Tabel 3. 10 Tren Realisasi indikator kinerja "Nilai IPP" Tahun 2021 – 2023 …….. 14
Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan ……. 17
Tabel 3. 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran …… 22
Tabel 3. 13 Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja ……. 24
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Kecamatan Jabon Tahun 2024 ……... 24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jabon …… 2
Grafik 3. 1 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 – 2023 11
Grafik 3. 2 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Nilai SAKIP Tahun 2021-2023 …….. 12
Grafik 3. 3 Tren Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Jabon Dengan Nilai SAKIP Nasional Tahun 2024 …… 13
Grafik 3. 4 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Nilai IPP Tahun 2021 – 2023 15

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berprinsip pada nilai – nilai pemerintahan yang baik *(good governance)* serta berorientasi hasil *(result oriented)*, Kecamatan Jabon berupaya mengimplementasikan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sukodono memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga (ke–3) dari periode perencanaan menengah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam rencana strategis Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Jabon 2021 – 2026 telah beberapa kali dirubah, guna memenuhi dinamika tuntutan publik atas pelayanan publik yang berkualitas dan lingkungan yang kondusif. Indikator – indikator kinerja tahunan dalam Rencana Strategis ter-breakdown menjadi perjanjian kinerja antara camat Jabon dengan Bupati Sidoarjo.

Laporan Kinerja Kecamatan Jabon Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Kami memiliki 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi	Capaian	Predikat *)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80,25	80,89	100%	Sangat Baik
		Nilai IPP	4,25	4,17	98%	Sangat Baik

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 ≤ 90	Baik
3	70,01 ≤ 80	Cukup
4	Kurang dari 70	Kurang

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kedudukan

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kewilayahan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Jabon

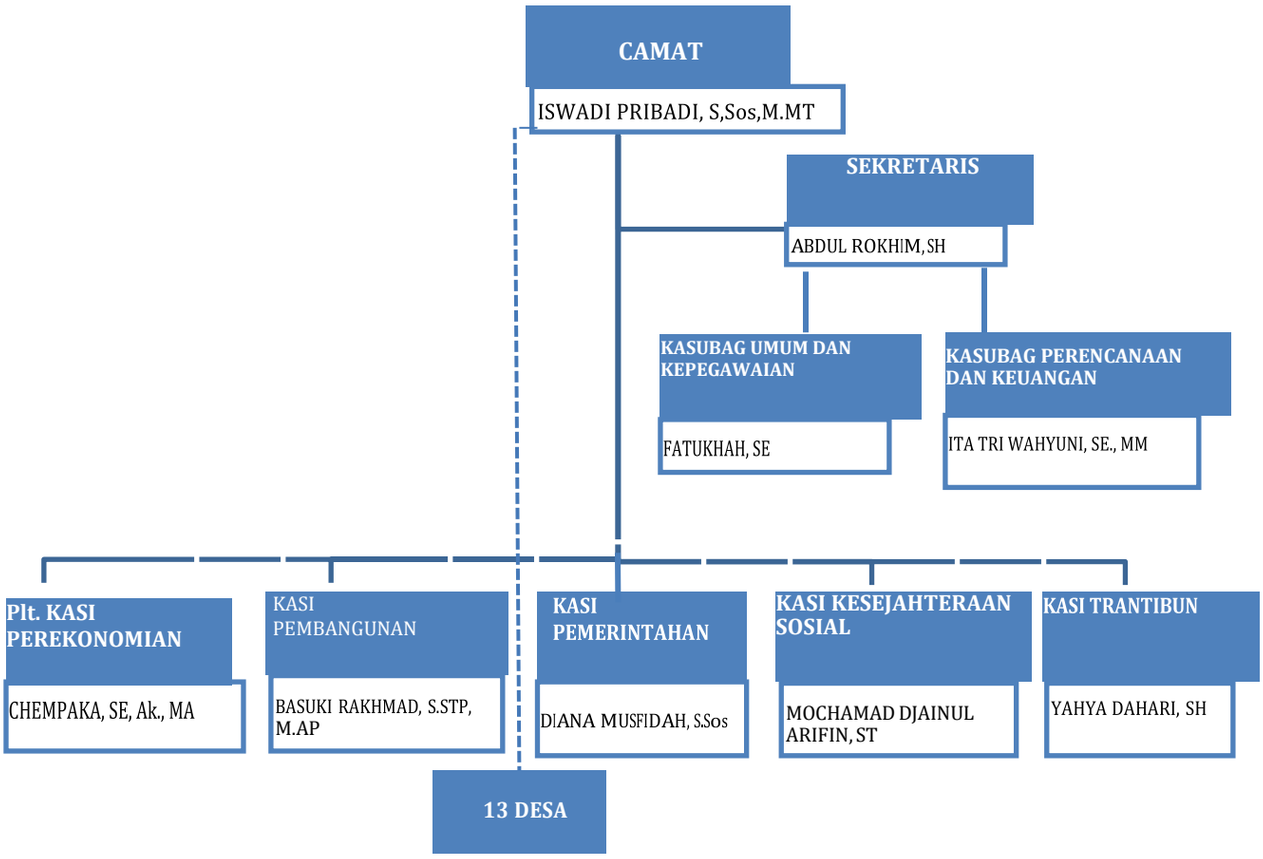

Sumber :
Peraturan Bupati Sidoarjo No. 91 Tahun 2016

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 17 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Berikut data ASN pada Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024.

Tabel 1. 1
Data ASN Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	
1	Camat	1	orang
2	Administrator	1	orang
3	Pengawas	6	orang
4	Pelaksana	9	orang
	JUMLAH	17	Orang

2. Aspek Strategi Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Adanya masyarakat yang mengabaikan akan pentingnya informasi administrasi kependudukan	Banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi sehingga, informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak menyebar secara maksimal	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan yang telah dipublikasikan 2. Penilaian Indek kepuasan Masyarakat yang belum dilakukan secara rutin setiap semester (6 Bulan)
2	Adanya pegawai yang lalai akan tugas dan fungsinya dalam berkerja	Rendahnya tingkat koordinasi antar pegawai dan bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Belum meratanya kompetensi SDM kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur 2. Belum matangnya perencanaan kegiatan secara teknis. 3. Pembagian jobdesc dalam pelaksana kegiatan masih kurang jelas Penjadwalan koordinasi, pelaksanaan rencana, dan laporan hasil yang masih kurang

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan isu strategis yang ada pada Kecamatan Jabon dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Belum Optimalnya Sarana Prasarana dan Infrastruktur Penunjang Kinerja Aparatur

Masih perlunya peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur seperti administrasi perkantoran, perawatan dan pengembangan gedung kecamatan dan ruang pelayanan, pencukupan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Masih Perlunya Peningkatan kinerja pegawai dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan capaian kinerja OPD, dan profesionalisme pegawai. Selain itu dari segi jumlah pegawai juga terdapat kekurangan terutama pegawai pada ruang pelayanan dan pendampingan desa sehingga pelayanan dan pendampingan desa yang dilakukan masih belum optimal.

c) Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan kepada Masyarakat

Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan melalui pencukupan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan, masih belum rutinnya pelaksanaan pengukuran Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan setiap 1 (satu) semester, dan belum optimalnya sosialisasi terkait prosedur pelayanan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengerti terkait prosedur pelayanan di Kecamatan.

d) Belum Optimalnya Pelaksanaan koordinasi Antar Pihak atau OPDTerkait

Masih belum optimalnya aparatur kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan yang berada di kecamatan terutama terkait penjadwalan yang pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

e) Belum Optimalnya Pemahaman Seluruh Aparatur KecamatanTerkait Perencanaan dan Pelaporan

Perlunya pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dimana tanggungjawab SAKIP tidak hanya bertumpu pada bagian perencanaan dan pelaporan saja tetapi seluruh Bidang/seksi di lingkup kecamatan.

f) Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan PotensiDaerah

Dalam Menghadapi tuntutan ekonomi global dan pasar bebas maka perlunya pemanfaatan dan pengembangan potensi local dari segi sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang ada agar mampu bersaing dan meningkatkan ekonomi daerah. Kecamatan Jabon yang masuk pada kawasan SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan) III meliputi wilayah dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dan SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan) V meliputi wilayah pesisir dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata masih belum optimalnya pemanfaatan kawasan tersebut guna meningkatkan ekonomi daerah.

g) Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Kinerja, danKeuangan

Masih banyaknya aparatur desa yang belum memahami terkait perencanaan dan pelaporan Pembangunan, Kinerja dan Anggaran sehingga desa masih banyak yang belum melaksanakan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas. Pada segi masyarakat desa juga masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam musrenbang desa.

h) Dampak Bencana Lumpur Lapindo

Adanya perubahan tata ruang terkait kawasan pemukiman dan sawah yang terkena dampak lumpur lapindo, adanya penurunan produktifitas pertanian masyarakat dan Pencemaran lingkungan kawasan sekitar lumpur lapindo.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Srategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi "Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah Misi ke – 1 dan Misi ke – 5 RPJMD.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jabon Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	N/A	71,50 %	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (75,5)	BB (77,5)	A (80,05)	A (80,25)	A (80,5)	A (80,75)
		Nilai IPP	N/A	N/A	A- (4,20)	A- (4,25)	A- (4,30)	A- (4,35)

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Jabon 2021- 2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	80, 25 (A)
		Nilai IPP	4,25 (A)
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Jabon 2021- 2026

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 4.350.258.716 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.503.526.819 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3

Tabel 2. 3
Rincian anggaran pada tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.022.387.319
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	221.410.000
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	78.917.500
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	176.795.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.017.000
	JUMLAH	**4.503.526.819**

Sumber : DPPA 2024 Kecamatan Jabon

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A Pengukuran Kinerja

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclousure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 ≤ 90	Baik
3	70,01 ≤ 80	Cukup
4	0 ≤ 70,01	Kurang

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realiasasi Tahun 2024	Capaian (%)	KATEGORI
1.	Meningkatnya Ketentraman danKetertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80,25	80,89	100%	Sangat Baik
		Nilai IPP	4,25	4,17	98%	Sangat Baik

B *Analisis Capaian Kinerja*

Capaian kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi. Adapun capaian kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realiasasi Tahun 2024	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1.	Meningkatnya	Prosentase Permasalahan	100%	100%	100%	100%	100%

	Ketentraman dan Ketertiban Umum	trantibumyang diselesaikan					
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80,25	80,89	100%	80,75	100%
		Nilai IPP	4,25	4,17	98%	4,35	95%

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap tiga (3) indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak nol (0) indikator;
2. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak dua (2) indikator;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak nol (1) indikator;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak nol (0) indikator.

1. Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Kinerja : Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan

Tabel 3.4
Capaian Prosentase Permasalahan trantibumyang difasilitasi Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026

Target Tahun 2024	Realiasasi Tahun 2024	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2021-2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan tahun 2024 dengan realisasi 100% dari target 100% dengan persentase sebesar 100%. Jika realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100% maka pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100% dari target akhir renstra. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 – 2024 sebelumnya tidak mengalami peningkatan atau penurunan (stabil), sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 5
Tren Realisasi indikator kinerja "prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan" Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	N/A	71,50%	100%	100%
Realisasi	N/A	100%	100%	100%
Capaian	N/A	139%	100%	100%

Grafik 3. 2
Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 – 2023

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP

Tabel 3. 6
Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai SAKIP	80,25	80,89	100%	80,75	100%

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai SAKIP tahun 2024 dengan realisasi 80,89 dengan kategori (Sangat Memuaskan) dari target 80,25 dengan persentase sebesar 100%. Jika realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 80,75 maka pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100% dari target akhir renstra. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 – 2024 sebelumnya telah mengalami tren peningkatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 7
Tren Realisasi indikator kinerja "Nilai SAKIP"
Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	75,50	77,50	80,05	80,25
Realisasi	77,35	78,91	79,52	80,89
Capaian	102%	101%	99%	100%

Grafik 3. 2
Tren Realisasi dari Indikator Kinerja (IK) Nilai SAKIP
Tahun 2021 – 2024

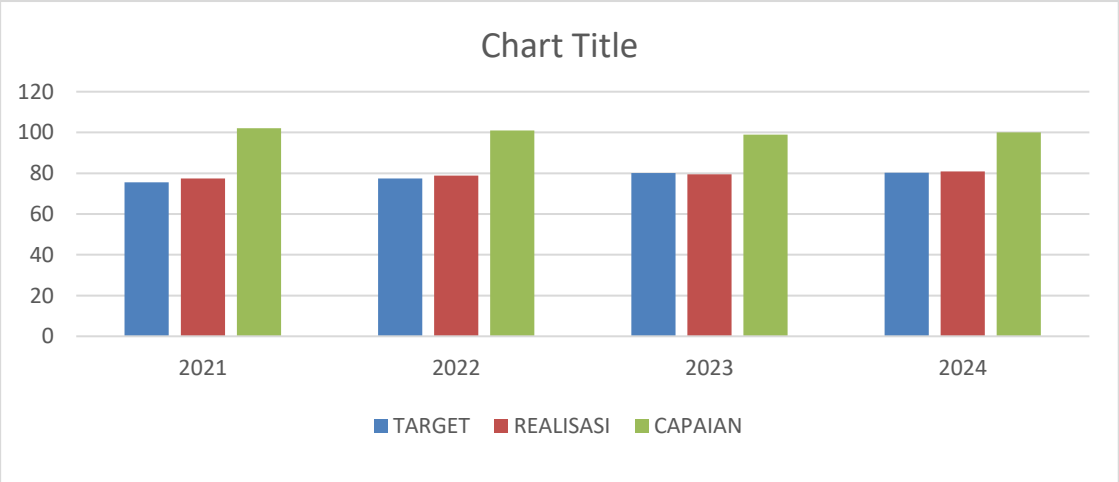

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP dengan Realisasi Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	
		Realisasi Kecamatan Jabon	Nasional
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80,89	64,23

Mengutip dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dari 505 pemkab/pemkot tahun 2024 rata – rata nilai SAKIP sebesar 64,23. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh Kecamatan Jabon sudah melebihi Realisasi Nilai Kabupaten Tingkat Nasional.

Grafik 3. 3
Tren Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Jabon
Dengan Nilai SAKIP Nasional Tahun 2024

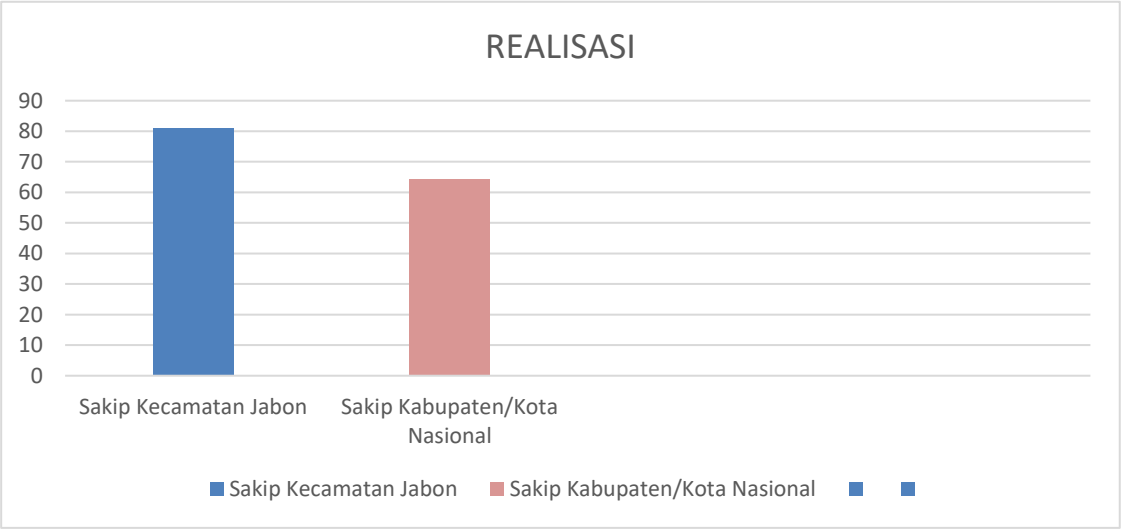

Indikator Kinerja : 2. Nilai IPP

Tabel 3. 9
Capaian Nilai IPP Tahun 2024 terhadap target Renstra 2026

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai IPP	4,25	4,17	98%	4,35	95%

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai IPP tahun 2024 dengan realisasi 4,17 dengan kategori (Sangat Memuaskan) dari target 4,25 dengan persentase sebesar 98%. Jika realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 4,35 maka pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 95 % dari target akhir renstra. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 – 2024 sebelumnya telah mengalami tren peningkatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 10
Tren Realisasi indikator kinerja "Nilai IPP"
Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	N/A	4,05	4,20	4,25
Realisasi	N/A	3,54	3,73	4,17
Capaian	N/A	87%	88%	98%

Pada tahun 2021, nilai Indeks pelayanan publik belum menjadi indikator kinerja utama Kecamatan. Namun seiring tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan prima, maka dilaksanakan reviu rencana strategis pada tahun 2022 untuk mengakomodir masuknya indeks pelayanan public sebagai salah satu indikator kinerja utama kecamatan

Grafik 3. 4
Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Nilai IPP Tahun 2021 – 2024

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai IPP tahun 2024 dengan realisasi 4,17 dengan kategori (Sangat Memuaskan) dari target 4,25 dengan persentase sebesar 98%. Berikut faktor – faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan capaian indikator nilai IPP :

1. Faktor Penunjang
   - Kebijakan Pelayanan mencakup regulasi, SOP dan instrumen – instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik
   - Menciptakan inovasi pelayanan yang baik, yaitu dengan meningkatkan efektivitas layanan dan inovasi bidang teknologi dan prosedur
2. Faktor Penghambat
   - Keterbatasan SDM yang kompeten dalam penanganan publik
   - Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
   - Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Menciptakan inovasi pelayanan yang baik, yaitu dengan meningkatkan
3. Upaya dalam mengatasi permasalahan
   - Menyediakan SDM yang kompeten untuk pelayanan publik
   - Menambah anggaran untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana pelayanan publik
   - Menambah dan memfasilitasi Sarana dan Prasarana untuk pelayanan publik

C *Evaluasi dan Analisis Kinerja*

a. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan dan pencapaian kinerja di tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa Sasaran strategis, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo rata-rata **Berhasil** dilakukan

sesuai dengan Indikator Sasaran, Indikator Program dan Indikator Kegiatan yang telah ditentukan.

b. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI PENCAPAIAN			% Capaian	Kategori
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Nilai IPP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Berhasil
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Berhasil
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Berhasil
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Berhasil
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Berhasil
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Berhasil

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Berhasil
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Berhasil
					Penyediaan Bahan/Material	100%	Berhasil
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Berhasil
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Berhasil
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	100%	Berhasil
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Berhasil
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Berhasil
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Berhasil
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100%	Berhasil

					Jabatan		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Berhasil
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Berhasil
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	Berhasil
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Berhasil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	Berhasil

2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Berhasil
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	Berhasil
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	Berhasil
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	Berhasil

			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Berhasil

D *Realisasi Kinerja Anggaran*

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja.

Tabel 3. 12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	80,25	80,89	100%	4.347.814.319	4.113.526.819	94%	99%
	Nilai IPP	4,25	4,17	98%				
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	255.712.500	223.685.000	87%	99%
Jumlah					**4.603.526.819**	**4.337.211.502**	**94,29%**	**99%**

Terkait pagu anggaran pada sasaran **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan"** yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan, untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan"** dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^{m}\left(\left(\left(\prod_{m}^{n}\frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}\right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut, Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Kecamatan Jabon adalah :

1. Sasaran **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan"** dengan tingkat efisiensi sebesar 99% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
   - Meningkatnya nilai SAKIP menjadi 80,89 dengan predikat A (Sangat Memuaskan) dari target kinerja 80,25 di tahun 2024
   - Meningkatnya nilai IPP menjadi 4,17 dengan predikat A (Sangat Memuaskan) dari target kinerja 4,25 di tahun 2024

2. Sasaran **"Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum"** dengan tingkat efisiensi sebesar 99% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :
   - Respon cepat dari aparatur Kecamatan Jabon perihal aduan trantibum langsung dari masyarakat maupun dari call centre 112;
   - Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertical terkait (sepertiforkopimka) dan para seksi Sinergi yang baik dengan jajaran Polsek Jabon dan Danramil Kecamatan Jabon

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 13
Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Nilai IPP	100% 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.122.387.319	3.935.984.002	95,48%
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.410.000	177.542.500	80,19%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.017.000	3.413.800	
Meningkat nya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.917.500	76.015.000	96,32%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	176.795.000	147.670.000	83,53%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja di Kecamatan Jabon tahun 2024.

3. Realisasi Anggaran

Tabel 3. 14
Realisasi Anggaran Kecamatan Jabon Tahun 2024

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.122.387.319	3.935.984.002	95,48%

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.410.000	177.542.500	80,19%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.017.000	3.413.800	84,98%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.917.500	76.015.000	96,32%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	176.795.000	147.670.000	83,53%
Jumlah	**4.603.526.819**	**4.340.625.302**	**94,29%**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2024 yaitu 2 (dua) Sasaran dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran yang ada di Kecamatan Jabon, antara lain :

1. Belum meratanya kompetensi SDM kecamatan dan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur
2. Adanya batasan Blanko e-KTP, sehingga pencetakan e-KTP juga terbatas.
3. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar dan mengabaikan perbup serta perkada.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan instansi vertikal di wilayah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran dan instansi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada outcome, berbasis kinerja dan bertujuan melayani Masyarakat.

B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa, yaitu dengan melakukan pelatihan dengan menggunakan learning management system dan melakukan pelatihan dengan menggunakan modul pengembangan kompetensi perangkat desa;
2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman pada masayarakat terkait ketersediaan blanko KTP-el yang sangat terbatas agar diperioritaskan untuk hal – hal mendesak dan perekaman baru. Pencetakan untuk penggantu KTP-el yang rusak, hilang, pengganti elemen data agar diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Indentitas (Suket) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) dan putusan MK tanggal 26 Maret 2019;
3. Melakukan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat pentingnya ketaatan peraturan dan melakukan kesadaran hukum yaitu dapat berupa tindakan dan pendidikan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERJANJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA 2024

KECAMATAN JABON

KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT**
Jabatan : CAMAT
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : **SUBANDI, S.H., M.Kn.**
Jabatan : WAKIL BUPATI SIDOARJO
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 1 Januari 2024

Pihak Kedua, WAKIL BUPATI SIDOARJO	Pihak Pertama, CAMAT
Ditandatangani secara elektronik oleh: SUBANDI, S.H., M.Kn.	Ditandatangani secara elektronik oleh: ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT 197012081992011002
SUBANDI, S.H., M.Kn.	**ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT** Pembina Tk.I 197012081992011002

PERJANJIAN KINERJA 2024

KECAMATAN JABON

KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai IPP	A- (4,25)
		Nilai SAKIP	A (80,05)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Tambahan	Target

JUMLAH ANGGARAN 2024

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.960.572.444	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 221.410.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 78.917.500	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 76.795.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.017.000	
	JUMLAH	Rp. 4.341.711.944	

Sidoarjo, 1 Januari 2024

Pihak Kedua, WAKIL BUPATI SIDOARJO	Pihak Pertama, CAMAT
Ditandatangani secara elektronik oleh: SUBANDI, S.H., M.Kn.	Ditandatangani secara elektronik oleh: ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT 197012081992011002
SUBANDI, S.H., M.Kn.	**ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT** Pembina Tk.I 197012081992011002

PAKTA INTEGRITAS

KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT, CAMAT** menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2024 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 1 Januari 2024

Pihak Kedua, WAKIL BUPATI SIDOARJO	Pihak Pertama, CAMAT
Ditandatangani secara elektronik oleh: SUBANDI, S.H., M.Kn.	Ditandatangani secara elektronik oleh: ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT 197012081992011002
SUBANDI, S.H., M.Kn.	**ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT** Pembina Tk.I 197012081992011002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024

IKI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

TAHUN 2024

KECAMATAN JABON
KABUPATEN SIDOARJO

MANUAL INDIKATOR
SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KECAMATAN JABON PERIODE PENILAIAN : 2024

RENCANA HASIL KERJA	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan
UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA	Nilai IPP
TUJUAN	meningkatkan kualitas pelayanan Publik OPD
DESKRIPSI	**Definisi**
	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja. Pelaksanaan PEKPPP dilakukan setiap tahun untuk memperoleh nilai indeks pelayanan publik (IPP)
	Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)
	Pelaksanaan PEKPPP dilakukan setiap tahun untuk memperoleh nilai indeks pelayanan publik (IPP)
SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI	Outcome
SUMBER DATA	Laporan hasil evaluasi IPP
PERIODE PELAPORAN	pertahun

RENCANA HASIL KERJA	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan
UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA	Nilai SAKIP
TUJUAN	Nilai SAKIP Diatas target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja
DESKRIPSI	**Definisi**
	Nilai SAKIP berasal dari implementasi pengatan kinerja OPD yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja, Evaluasi Internal , Pengendalian Resiko dan lain sebagainya
	Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)
	Nilai SAKIP dalam satu tahun
SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI	Outcome
SUMBER DATA	LHE SAKIP
PERIODE PELAPORAN	pertahun

RENCANA HASIL KERJA	Persentase Permasalahan trantiban yang difasilitasi
UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA	Persentase Permasalahan trantiban yang di fasilitasi oleh Kecamatan
TUJUAN	Persentase Permasalahan trantiban yang di fasilitasi
DESKRIPSI	**Definisi**
	Persentase Permasalahan trantiban yang di fasilitasi
	Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)
	Jumlah permasalahan trantiban yang difasilitasi dalam satu tahun / jumlah permasalahan trantiban dalam satu tahun x100%
SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI	Outcome
SUMBER DATA	Laporan seksi ketentraman dan ketertiban umum
PERIODE PELAPORAN	pertahun

RENCANA HASIL KERJA	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi
UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA	Jumlah JP yang diikuti dalam peningkatan kompetensi
TUJUAN	Terlaksananya Jumlah JP yang diikuti dalam peningkatan kompetensi
DESKRIPSI	**Definisi**
	sesuai Perbup Sidoarjo no 64 tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo
	Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)
	Akumulasi JP yang diikuti dalam peningkatan kompetensi
SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	
KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI	Outcome
SUMBER DATA	Sertifikat
PERIODE PELAPORAN	pertahun

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA AKSI

KECAMATAN JABON

2024

RENCANA AKSI

KECAMATAN JABON PERIODE PENILAIAN : 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT	Nama	SUBANDI, S.H., M.Kn.
NIP	197012081992011002	NIP	01
Pangkat / Gol.Ruang	IV/b / Pembina Tk.I	Pangkat / Gol.Ruang	nonpns / Tenaga Non PNS
Jabatan	CAMAT	Jabatan	WAKIL BUPATI SIDOARJO
Unit Kerja	KECAMATAN JABON	Unit Kerja	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

HASIL KERJA		
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Evaluasi pelayanan
2	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Evaluasi Internal Berkala
3	Persentase Permasalahan trantiban yang difasilitasi	Rencana Aksi :
		Mengarahkan seluruh desa/kelurahan agar menjaga trantiban wilayahnya
4	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi	Rencana Aksi :
		Mengikuti Seminar

Sidoarjo, 1 Januari 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUBANDI, S.H., M.Kn.
01

SUBANDI, S.H., M.Kn.
01

CAMAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT
197012081992011002

ISWADI PRIBADI, S.Sos., M.MT
197012081992011002

POHON KINERJA YANG MENUNJANG SASARAN KINERJA 2024

PETA KINERJA : KECAMATAN JABON

Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di tingkat Kecamatan
...../Layanan kesekretariatan yang prima
...../...../Perencanaan Kinerja dan Pelaporan OPD yang efektif
...../...../...../Perencanaan kinerja OPD yang efektif
...../...../...../Evaluasi dan pelaporan kinerja OPD yang tepat waktu
...../...../Pengelolaan Keuangan yang akuntabel
...../...../...../Perencanaan anggaran keuangan (RKA)
...../...../...../Penatausahaan Keuangan akuntabel dan sesuai ketentuan
...../...../...../Pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu
...../...../Pengelolaan Kepegawaian yang baik
...../...../...../Peningkatan kompetensi SDM
...../...../...../Pengelolaan Administrasi Karier yang tertib
...../...../Pengelolaan Asset yang sesuai ketentuan
...../...../...../Perencanaan Asset sesuai kebutuhan
...../...../...../Penggunaan BMD sesuai ketentuan
...../...../...../Penyusunan laporan BMD sesuai ketentuan
...../...../...../Pengamanan BMD (sarana dan prasarana)
...../...../...../Terpeliharanya sarana dan prasarana
...../...../...../Terpeliharanya kebersihan sarana dan prasarana
...../...../...../Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan
...../...../Pengelolaan Surat dan arsip yang tertib
...../...../...../Tempat arsip yang memadai dan sesuai ketentuan
...../...../...../Administrasi surat dan dokumen produk PD tertib sesuai ketentuan
...../...../...../Dokumen kepegawaian yang tertib
...../...../...../Pengelolaan dokumen keuangan yang tertib
...../...../Pelayanan difasilitasi sesuai ketentuan
...../...../...../Layanan tamu atau konsumen yang baik
...../...../...../Layanan pengaduan sesuai dengan ketentuan
...../...../...../Disesuaikan denfgan layanan utama OPD
...../...../Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
...../...../...../Perencanaan pengadaan yang tertib
...../...../...../Pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan dan administrasi lengkap
...../...../...../Serah terima pengadaan terdokumentasikan dan sesuai ketentuan
...../...../Penyajian informasi yang update dan akurat
...../...../...../Pengelolaan pelaporan dan informasi yang update
...../Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang berkualitas yang dilengkapi Standard Mutu Layanan
...../...../Layanan Dukcapil terfasilitasi sesuai ketentuan
...../...../Layanan dokumen ketenagakerjaan (AK-I) terfasilitasi sesuai ketentuan
...../...../Layanan Administrasi Lainnya
...../...../...../Dipenasasi Pernikahan Muslim
...../...../...../Pengumuman Pernikhan Non Muslim
...../...../...../Legalisasi dokumen lainnya (waris, SKTM, dll)
...../...../...../Rekomendasi Ijin Keramaian
...../Optimalisasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
...../...../Optimalisasi koordinasi trantibum yang kondusif
...../...../...../Pembinaan Trantibum (Linmas, Pamdes, Poskamling)
...../...../...../Fasilitasi dukungan Penegakan Perda dan Perbup
...../...../...../Mediasi Penanganan Perselisihan Masyarakat
...../...../...../Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional
...../...../...../Pengamanan Kegiatan
...../...../...../Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
...../...../Terfasilitasinya layanan pengembangan UMKM
...../...../Terfasilitasi layanan Bidang Kesejahteraan Sosial
...../...../Terfasilitasi layanan bidang Kesehatan Masyarakat (UKS, Stunting, ASMAN, KB)
...../...../Terfasilitasi layanan Bidang Keagamaan(penerimaan zakat, MTQ, MUI Kecamatan, keagamaan)
...../...../Terfasilitasi layanan Bidang Pendidikan (KKN, Magang, PKL, Penelitan , Dll)
...../...../Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
...../...../Pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah
...../Tata Kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien
...../...../Tata kelola perencanaan pembangunan desa yang efektif
...../...../...../RPJMDes tersusun sesuai ketentuan
...../...../...../RKPDes tersusun sesuai ketentuan
...../...../...../Fasilitasi Musrembang desa
...../...../Tata kelola keuangan desa yang akutabel
...../...../...../R-APBDes dan Perubahan tersusun sesuai ketentuan
...../...../...../Evaluasi R-APBDes dan Perubahan dapat di tindaklanjuti
...../...../...../Penetapan APBDes dan Perubahan tersusun sesuai ketentuan
...../...../...../Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes dan Perubahan(Per semester)
...../...../...../Monitoring dan Evaluasi BK dan BKK (administrasi)
...../...../...../Monitoring dan Evaluasi APBDes Bidang Pembangunan
...../...../Tata kelola aset desa yang akuntabel
...../...../...../Pendampingan Inventarisasi dan pengamanan Aset Desa
...../...../...../Pendampingan penyusunan PerDes Aset Desa
...../...../...../Fasilitasi pengelolaan Aset Desa (kerjasama pemanfaatan, tukar menukar, dll)
...../...../...../Fasilitasi permasalahan aset desa
...../...../Aparatur Pemerintah Desa yang kompeten
...../...../...../Meningkatnya kapasitas aparatur desa
...../...../...../Pendampingan pengisian kekosongan aparatur desa
...../...../BPD yang memahami tugas dan fungsinya
...../...../...../Pembinaan BPD
...../...../...../Pendampingan Sosialisasi dan pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD
...../...../...../Fasilitasi Penetapan dan Pelantikan Anggota BPD
...../...../...../Fasilitasi PAW anggota BPD
...../...../Lembaga-lembaga Desa (RT, RW, LPMD, PKK, Kartar, Karang Wreda, dll) yang berperan secara aktif
...../...../BUMDes yang berkontribusi efektif terhadap PADes
...../...../...../Pendampingan pembentukan BUMDes
...../...../...../Pembinaan BUMDes
...../...../...../Monitoring dan Evaluasi BUMDes
...../...../Layanan pemerintahan desa yang prima
...../...../Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BUMDesMa)
...../...../Pembinaan Koperasi Wanita Desa

MATRIKS RENSTRA / RENJA

Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output 1/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan																	
		Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	BB (75,5)		BB (77,5)		A (80,05)		A (80,25)		A (81,5)		A (81,75)		A (81,75)			
		Nilai RB Kecamatan Jabon	N/A		27,22		27,22		27,22		28,5		28,5		28,5			
		Nilai IPP Kecamatan Jabon	N/A		A- (4,05)		A- (4,10)		A- (4,25)		A- (4,30)		A- (4,35)		A- (4,35)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	70,00%	1.387.231.253,00	73,33%	767.360.100,00	0,00%	490.350.000,00	78,05%	4.834.378.809	80,05%	5.559.535.630	82,61%	6.301.465.975	82,61%	6.301.465.975		
		b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart	94,48%		98,75%		96,00%		96,53%		96,94%		97,34%		97,34%			
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	13660	110.116.931,00	7900	21.982.500,00	8500	0,00	13910	54.156.375	14260	62.279.831	14610	71.621.806	14610	71.621.806		
	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima	13400		8000		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	N/A		50 orang		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	-	N/A	0,00	N/A	0,00	3 Laporan	54.156.375	3 Laporan	62.279.831	3 Laporan	71.621.806	3 Laporan	71.621.806		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	7 Laporan	-	11 Laporan	503.853.550,00	13 Laporan	490.350.000,00	12 Laporan	295.503.334	12 Laporan	339.828.835	16 Laporan	390.803.160	16 Laporan	390.803.160		
		a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	103.360.469	5 Kegiatan	503.853.550	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 kegiatan		1 Kegiatan		N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	5 kegiatan		2 kegiatan		N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	N/A				N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	0,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	-	N/A	-	13 Laporan	490.350.000,00	8 Laporan	563.902.500,00	8 Laporan	648.487.875,00	8 Laporan	745.761.056,25	8 Laporan	745.761.056,25		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	7 berkas	1.277.114.322,00	0 berkas	241.556.050,00	0 berkas	0,00	~~45 berkas~~	4.484.719.100	~~47 berkas~~	5.157.426.964	~~49 berkas~~	5.931.041.009	~~49 berkas~~	5.931.041.009		
		b. Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	5 Laporan		8 laporan		N/A		8 Laporan		8 Laporan		8 Laporan		8 Laporan			
		c. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1 Laporan		3 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	10 berkas	-	15 berkas	7.697.350,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	19 berkas	30.106.051	21 berkas	34.621.959	23 berkas	39.815.253	23 berkas	39.815.253		

	Pelaksana an Urusan Pemerintа han yang terkait dengan Nonperizin an	a. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	N/A	-	1 kegiatan	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan yang dilaksanakan	1 kegiatan		2 kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		c. Jumlah monev bidang pemerintahan yang dilaksanakan	4 kegiatan		4 kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		d. Jumlah monev bidang perekonomian yang dilaksanakan	N/A		1 kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A	-	N/A	-	13 Laporan	42.500.000	8 Laporan	48.875.000	8 Laporan	56.206.750	8 Laporan	64.637.188	8 Laporan	64.637.188		
	Pelaksana an Urusan Pemerintа han yang terkait dengan Kewenang an Lain yang Dilimpahk an	a. Jumlah kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan	N/A	0,00	1 kegiatan	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan	1 kegiatan		2 kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	4 kegiatan		4 kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	-	1 kegiatan	-	N/A	3.831.076.564	4 Laporan	4.405.738.048	4 Laporan	5.066.598.756	4 Laporan	5.826.588.569	4 Laporan	5.826.588.569		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuandan tepat waktu	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	100%	326.178.147	100%	375.104.869	100%	431.370.599	100%	431.370.599		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	N/A	1.277.114.322,00	1 Kegiatan	233.858.700,00	N/A	0,00	15 Desa	326.178.147	15 Desa	375.104.869	15 Desa	431.370.599	15 Desa	431.370.599		
	Fasilitasi Administra si Tata Pemerintа han Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi	1 kegiatan	10.631.164	4 Kegiatan	4.235.100	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	N/A		1 Kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	15 Dokumen	174.867.030	15 Dokumen	201.097.073	15 Dokumen	231.261.634	15 Dokumen	231.261.634		

	Fasilitasi Pelaksana an Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	N/A	0,00	1 Kegiatan	6.341.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Fasilitasi Pelaksana an Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	15 Dokumen	58.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	77,78%	4.934.391.764,00	82,61%	4.197.513.546,00	86,96%	4.447.371.865,00	91,30%	8.263.913.802	95,65%	9.314.355.338	95,65%	10.495.188.744	95,65%	10.495.188.744		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	4 Tahapan	50.000.000,00	3 tahapan	1.636.400,00	3 tahapan	2.407.000,00	3 tahapan	8.015.966	3 tahapan	10.368.360	3 tahapan	11.873.604	3 tahapan	11.873.604		
		b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	4 rekomendasi		4 rekomendasi		4 rekomendasi		4 rekomendasi		4 rekomendasi		4 rekomendasi		4 rekomendasi			
		c. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	N/A		N/A		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen			
		d. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	N/A		N/A		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen			
	Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	4 rekomendasi	50.000.000	4 rekomendasi	1.083.400	4 rekomendasi	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	50.000.000,00	7 dokumen	1.083.400,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.253.466	1 dokumen	1.441.485	1 dokumen	1.657.708	1 dokumen	1.657.708		
	Koordinasi dan Penyusun an Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		
	Koordinasi dan Penyusun an Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		
	Koordinasi dan Penyusun an DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		
	Koordinasi dan Penyusun an Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Laporan	1.437.500	1 Laporan	1.653.125	1 Laporan	1.901.094	1 Laporan	1.901.094		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	5 Dokumen	-	4 Dokumen	553.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Laporan	1.016.000,00	5 Dokumen	1.715.000	5 Dokumen	1.972.750	5 Dokumen	2.391.213	5 Dokumen	2.391.213		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	92,38%	2.852.510.643,00	98,80%	2.553.718.532,00	98,80%	2.762.544.790,00	91,79%	4.657.363.213	91,86%	5.355.967.695	92,85%	6.159.363.850	92,85%	6.159.363.850		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	18 orang	2.852.510.643,00	17 Orang	2.553.718.532,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	0,00	N/A	0,00	20 Orang/bulan	2.762.544.790,00	23 orang/tuan	4.638.913.213	25 orang/tuan	5.355.550.195	25 orang/tuan	6.124.383.735	25 orang/tuan	6.124.383.735		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	4.600.000	1 Dokumen	5.398.000	1 Dokumen	6.003.500	1 Dokumen	6.003.500		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Dokumen	4.600.000	12 Dokumen	5.398.000	12 Dokumen	6.003.500	12 Dokumen	6.003.500		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Informasi keuangan yang disajikan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	3.967.500	1 Dokumen	4.562.625	1 Dokumen	4.562.625		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Laporan	5.175.000	1 Laporan	5.951.250	1 Laporan	6.843.938	1 Laporan	6.843.938		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	3.875.000	1 Dokumen	3.306.250	1 Dokumen	3.803.188	1 Dokumen	3.803.188		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semester nan PD yang tersusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2 Laporan	3.875.000	2 Laporan	3.306.250	2 Laporan	3.803.188	2 Laporan	3.803.188		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	3.875.000	1 Dokumen	3.306.250	1 Dokumen	3.803.188	1 Dokumen	3.803.188		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin	72,22%	-	N/A	0,00	0,00%	0,00	86,96%	33.527.500	88,80%	48.086.875	92,80%	33.663.719	92,80%	33.663.719		
		b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	N/A		N/A		0,00%		4,35%		8,00%		12,00%		12,00%			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	6.500.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang disediakan	32 Stel	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	32 Stel	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	40 Paket	4.750.000	40 Paket	17.186.250	40 Paket	5.462.500	40 Paket	5.462.500		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	4.887.500	1 Dokumen	5.628.625	1 Dokumen	6.463.719	1 Dokumen	6.463.719		
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Orang	6.400.000	2 Orang	10.080.000	3 Orang	12.096.000	3 Orang	12.096.000		

	Monitoring , Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Dokumen	6.808.000	4 Dokumen	7.308.000	4 Dokumen	8.648.000	4 Dokumen	8.648.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**85,85**	**390.345.896,00**	**Sangat Baik (90,5)**	**346.861.314,00**	**Sangat Baik (91,5)**	**298.693.770,00**	**Sangat Baik (92,5)**	**591.817.595**	**Sangat Baik (93,5)**	**642.250.934**	**Sangat Baik(94,5)**	**747.354.095**	**Sangat Baik (94,5)**	**747.354.095**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	2 jenis	6.017.687,00	2 Jenis	4.412.108,80	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Paket	7.669.080,00	4 Paket	6.348.593	4 Paket	7.176.682	4 Paket	8.253.184	4 Paket	8.253.184		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	36 Jenis	43.399.826,00	31 Jenis	33.692.110,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	2 paket	30.461.725,00	2 paket	49.035.997	2 paket	53.909.596	2 paket	59.333.556	2 paket	59.333.556		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Paket	11.250.000	0 Paket		1 Paket	13.500.000	1 Paket	13.500.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan	11.305 liter	113.858.000,00	7000 liter	115.880.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Paket	168.000.000,00	1 Paket	153.000.000	1 Paket	155.000.000	1 Paket	178.250.000	1 Paket	178.250.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	12.129.591,00	4 Jenis	15.445.800,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Paket	13.050.008,00	2 Paket	34.660.896	2 Paket	28.260.830	2 Paket	32.614.834	2 Paket	32.614.834		
	Penyediaan Bahan Bacaan	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2 jenis	2.262.536,00	1 jenis	1.560.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	1.560.000,00	1 Dokumen	2.206.809	1 Dokumen	2.527.842	1 Dokumen	2.918.508	1 Dokumen	2.918.508		
	Penyediaan Bahan /Material	Jenis bahan/material yang tersedia	24 jenis	21.926.498,00	26 Jenis	15.733.630,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Paket	8.467.267,00	4 Paket	28.893.291	4 Paket	33.227.265	4 Paket	38.211.377	4 Paket	38.211.377		

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jenis jamuan yang disediakan	600 kotak	14.150.000,00	600 Kotak	11.875.800,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	N/A		1 Kali		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	19.950.008,00	12 Laporan	15.000.800	12 Laporan	15.250.800	12 Laporan	15.500.800	12 Laporan	15.500.800		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang dinaskibkan	81,25%	117.198.777,00	100,00%	149.142.474,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	400 kali		600 kali		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	200 Laporan	57.565.600,00	250 Laporan	301.530.800	400 Laporan	346.759.508	450 Laporan	398.771.425	450 Laporan	398.771.425		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jenis BMD yang diadakan**	**1 jenis**	**37.411.415,00**	**1 jenis**	**16.877.380,00**	**3 jenis**	**92.355.336,00**	**5 jenis**	**806.250.000,00**	**5 jenis**	**534.770.385,97**	**4 jenis**	**553.389.049,52**	**4 jenis**	**553.389.049,52**		
		Jumlah BMD yang diadakan	**N/A**		**N/A**		**5 Unit**		**5 Unit**		**7 Unit**		**5 Unit**		**5 Unit**			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 unit	350.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	1 unit	38.000.000	2 unit	79.000.000	2 unit	79.000.000		
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Mebel	Jenis mebelelur yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	3 unit	28.750.000	4 unit	33.063.500	5 unit	38.021.875	5 unit	38.021.875		

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	6 Unit	37.411.425,00	12 Unit	56.977.500,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	5 unit	41.355.338,00	7 unit	86.350.000	8 unit	99.187.500	10 unit	114.065.625	10 unit	114.065.625		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jenis aset tetap lainnya yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	50.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jenis aset tak berwujud yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	1 unit	106.250.000	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	102.025.000	1 Unit	122.430.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000		
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	1.847.633.000,00	100%	1.651.836.000,00	100%	1.050.131.000,00	100%	1.714.776.228	100%	1.985.371.223	100%	2.299.327.429	100%	2.299.327.429		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang diolah	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	307.204.000,00	12 Bulan	307.800.004,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	263.400.000,00	12 Laporan	413.413.500	12 Laporan	475.425.525	12 Laporan	546.739.354	12 Laporan	546.739.354		

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	19.350.000	12 Laporan	21.175.000	12 Laporan	23.292.500	12 Laporan	23.292.500		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	6 Orang	748.433.000,00	6 Orang	744.836.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	1 Orang		1 Orang		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	11 Orang		11 Orang		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	16 orang		16 Orang		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	756.722.000,00	12 Laporan	1.282.152.739	12 Laporan	1.488.770.698	12 Laporan	1.726.295.576	12 Laporan	1.726.295.576		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3 Jenis	616.498.000,00	5 Jenis	107.100.000,00	4 Jenis	301.248.000,00	6 unit	648.377.500	8 Jenis	891.360.250	7 Jenis	934.471.038	7 Jenis	934.471.038		
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	N/A		N/A		100%		100%		100%		100%		100%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	N/A	0,00	2 unit	20.000.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	N/A	0,00	2 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	0,00	N/A	0,00	2 unit	30.000.000,00	2 unit	23.403.500	2 unit	25.740.750	2 unit	29.604.163	2 unit	29.604.163		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara;	6 unit	47.580.000,00	4 unit	27.500.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jenis bahan perbaikan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	6 Unit		4 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	0,00	N/A	0,00	4 unit	31.000.000,00	4 unit	44.175.000	4 unit	48.792.500	4 unit	56.007.875	4 unit	56.007.875		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pembelian Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		b. Jumlah Alat Besar yang dalam pemliharaanya	N/A		N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Pembinanya	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pembelian Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dalam pemliharaanya	N/A		N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Pembinanya	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pemeliharaan Mebel	Jenis mebelair yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	5 unit	14.300.000	5 unit	15.730.000	5 unit	15.730.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 jenis	85.000.000,00	5 Jenis	85.000.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	65 Unit	103.500.000,00	67 Unit	139.150.000	69 Unit	153.065.000	71 Unit	168.371.500	71 Unit	168.371.500		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jenis aset tak berwujud yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	1 unit	71.500.000	N/A	-	N/A	-		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara/ rehabilitasi	300 m2	493.998.000,00	350 m2	175.890.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	1 unit	137.749.000,00	1 unit	207.080.000	1 unit	238.050.000	1 unit	273.757.500	1 unit	273.757.500		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 unit	226.550.000	1 unit	170.000.000	1 unit	195.500.000	1 unit	195.500.000		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0 unit	-	1 unit	170.000.000	1 unit	195.500.000	1 unit	195.500.000		

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/ rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	70,00%		71,50%		100%		100%		100%		100%					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pelanggaran perda dan perkasda yang ditangani	75,00%	222.838.451,00	81,25%	36.190.000,00	100,00%	16.325.000,00	100,00%	242.333.912	100,00%	425.012.544	100,00%	470.963.798	100,00%	470.963.798		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a.Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang bertahan	3 Laporan	125.601.361,00	4 laporan	35.110.000,00	1 laporan	16.325.000,00	10 laporan	232.833.912	12 laporan	414.512.544	13 laporan	455.963.798	13 laporan	455.963.798		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan II	Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	70.780.000,00	1 Kegiatan	7.437.500,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	5 Laporan	56.604.200	4 Laporan	62.523.138	5 Laporan	68.775.432	5 Laporan	68.775.432		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	54.821.361,00	5 Kegiatan	27.672.500,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Laporan	16.325.000,00	5 Laporan	175.694.712	8 Laporan	351.989.424	8 Laporan	387.188.366	8 Laporan	387.188.366		

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkada yang difasilitasi	9 permasalahan	97.137.090,00	3 permasalahan	1.080.000,00	0 permasalahan	0,00	15 permasalahan	9.500.000	8 permasalahan	10.500.000	7 permasalahan	15.000.000	7 permasalahan	15.000.000		
	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah Operasi penerapan dan penegakan perda yang dilaksanakan	48	97.137.090,00	36	1.080.000,00	N/A	0,00	N/A		N/A		N/A		N/A			
		b. Jumlah permasalahan pelanggaran perda dan perkada yang terdaftar	12 Permasalahan	97.137.090	3 Permasalahan	1.080.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		c. Jumlah monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	-		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	-	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Laporan	9.500.000	4 Laporan	10.500.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	12.769.465,00	100%	48.394.224,00	100%	22.537.908,00	100%	332.356.115	100%	329.334.533	100%	368.984.713	100%	368.984.713		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 kegiatan	12.769.465,00	3 kegiatan	48.394.224,00	1 kegiatan	22.537.908,00	6 kegiatan	332.356.115	5 kegiatan	329.334.533	5 kegiatan	368.984.713	5 kegiatan	368.984.713		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 Upacara	12.769.465,00	2 Kegiatan	48.394.224,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah lomba- lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	N/A		1 Kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	N/A	0,00	N/A	0,00	150 orang	22.537.908,00	400 orang	332.356.115	400 orang	329.334.533	400 orang	368.984.713	400 orang	368.984.713		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang dilaksanakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000		
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diberdayakan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	15 Lembaga Masyarakat	37.500.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		

LHE SAKIP 2024

TANGGAPAN / TINDAK LANJUT
EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

BUKTI DUKUNG PENGUKURAN KINERJA SETIAP INDIKATOR KINERJA

SAKIP

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat Jln. Untung Suropati Nomor.10 Tlp.(031) 8948163 Faks.(031) 99010187
SIDOARJO - 61218
Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id Website : inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 12 Desember 2024

Nomor : 700.1/3849/438 . 4/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Penyampaian Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024

Kepada
Yth Camat Jabon
di
JABON

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 82 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami telah selesai melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2024 di OPD Saudara.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa nilai AKIP pada Kecamatan Jabon adalah sebesar 80,89 dengan predikat A (Memuaskan). Adapun hasil secara rinci atas evaluasi dimaksud, kami sampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi AKIP setelah ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

S K M

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Kecamatan Jabon

000/1703/438.7.17/2024

Periode survei : 01 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Sangat Baik

98.60

Responden

Jumlah : 315 Orang
Jenis Kelamin: L=155 Orang / P = 160 Orang
Pendidikan:
SMP= 35 Orang
SMA= 275 Orang
D1/D2/D3= 0 Orang
S1= 4 Orang
S2= ${j_s22} Orang
Lainnya= 1 Orang

CAMAT JABON

Ditandatangani secara elektronik oleh

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT.
NIP. 197012081992011002

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT.
PEMBINA TK. I
NIP 197012081992011002

Terimakasih atas penilaian yang telah anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan Unit Kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat